

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 30 November 2022



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

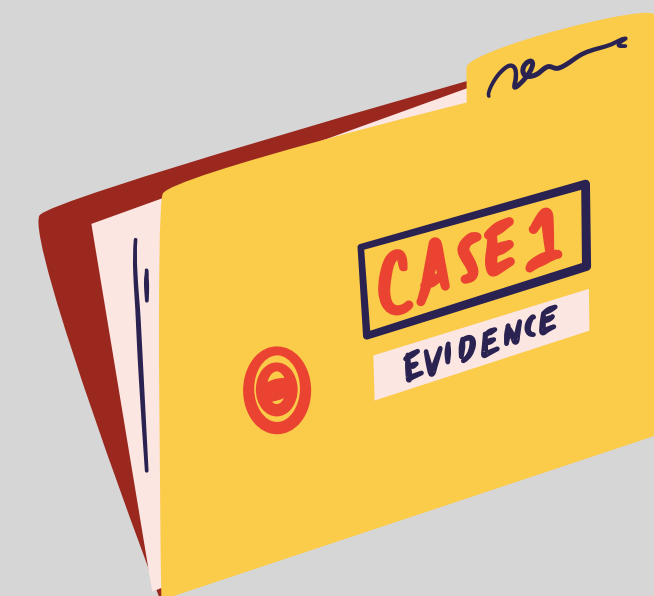
4 PUTUSAN DITOLAK

- 1 Putusan atas Pengujian UU 28/2014 Hak Cipta
- 1 Putusan atas Pengujian UU 8/1981 Hukum Acara Pidana
- 1 Putusan atas Pengujian UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 1 Putusan atas Pengujian UU 19/2008 Surat Berharga Syariah Negara



1 PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN

- Putusan atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu





PUTUSAN NO. 63/PUU-XIX/2021

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

PT. Musica Studios yang diwakili oleh Gumilang Ramadhan (Direktur PT. Musica Studios)

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dkk.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta

Batu Uji:
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 61/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU HAP) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imram Nating, S.H., M.H., Andrijani Sulistiowti, S.H., M.H., Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb, Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LL.M., Ida Haerani, S.H., M.H., Muhamad Arifudin, S.H., Bernard Jungjungan P, S.H., Ari Torando S.H., Agung Laksono, S.H.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 54 UU HAP

Batu uji:

Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 87/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Leonardo Siahaan, S.H.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017

Batu Uji:

Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...



PUTUSAN NO. 87/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



PUTUSAN NO. 98/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Irfan Kamil

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 273 UU 22/2009

Batu uji:
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 100/PUU-XX/2022

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Rega Felix

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008

Batu uji:
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>